

**Pelayanan Kesehatan dalam masa Krisis:
Studi Kasus akibat perundungan dan Dampak Kepercayaan Publik
di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung**

dr. Dodi Lintong Hartoni Lumban Gaol, Sp.B Subsp.Onk (K) QRGP, dr. Fitra Hergyana, Sp. DVE.,
FINS DV., MH., Kes., MM., dr. Maya Kusumawati, Sp.PD-KEMD
TIM DIKLAT RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung,
Direktorat SDM, Pendidikan & Penelitian

Abstrak

Kasus perundungan dan pelecehan yang mencuat di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung telah memicu krisis kepercayaan publik. Peristiwa ini tidak hanya memunculkan kemarahan masyarakat, tetapi juga meruntuhkan citra institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan sebagai penjaga standar etika, profesionalisme, dan keselamatan pasien. Tulisan ini memaparkan latar belakang dan kronologi kejadian, menelaah dampaknya terhadap reputasi institusi, serta mengulas langkah-langkah perbaikan yang telah diambil. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembentukan komisi disiplin dan anti-kekerasan, penerapan pedoman sanksi, penegakan aturan tanpa pandang bulu, hingga perbaikan sistem kerja dan pendampingan korban. Meski menunjukkan komitmen yang kuat, pemulihan kepercayaan publik bukanlah proses instan. Diperlukan konsistensi, keterbukaan, dan upaya pencegahan yang tertanam dalam budaya kerja. Dengan strategi yang tepat dan kesungguhan semua pihak, RSHS dapat membangun kembali reputasinya sebagai lingkungan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan berintegritas.

Kata kunci: krisis kepercayaan publik, perundungan, pelecehan seksual, pendidikan kedokteran, rumah sakit Pendidikan

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh terungkapnya kasus perundungan (bullying) dan pelecehan yang melibatkan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Kasus ini tidak hanya memunculkan kemarahan publik, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit sebagai institusi publik yang diamanahkan untuk menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

Krisis kepercayaan publik adalah kondisi ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap kredibilitas, integritas, dan komitmen sebuah institusi dalam menjalankan fungsinya. Krisis ini sering kali dipicu oleh kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai etika, norma hukum, atau harapan masyarakat. Dalam konteks institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan, isu ini menjadi lebih sensitif karena menyangkut keselamatan pasien, mutu layanan kesehatan, serta kualitas pembelajaran tenaga medis masa depan.

Tulisan ini membahas kronologi dan dampak kasus perundungan tersebut, upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan, serta strategi yang dapat diterapkan oleh RSHS untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Harapannya, paper ini dapat memberikan gambaran komprehensif sekaligus rekomendasi kebijakan yang realistis.

Krisis Kepercayaan Publik akibat Kasus Perundungan

Kasus perundungan di lingkungan FK Unpad–RSHS pertama kali mencuat ke publik pada Agustus 2024. Laporan media mengungkapkan adanya tindakan intimidasi, kekerasan verbal, hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap peserta PPDS Bedah Saraf. Investigasi internal menemukan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa senior, tetapi juga melibatkan staf pengajar. Sanksi tegas pun dijatuhkan, mulai dari pemutusan studi bagi peserta dengan pelanggaran berat, skorsing dosen, hingga perpanjangan masa studi bagi pelaku dengan pelanggaran sedang hingga ringan.

Respon keras datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Barat yang menyatakan bahwa praktik perundungan bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik profesi. Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Menteri Kesehatan turut memberikan perhatian khusus, menekankan pentingnya pengawasan internal serta pembatasan jam kerja residen untuk mencegah tekanan berlebihan yang dapat memicu perilaku negatif.

Krisis kepercayaan semakin dalam ketika pada April 2025 terungkap kasus pelecehan seksual terhadap keluarga pasien oleh seorang mahasiswa PPDS di lingkungan RSHS. Meskipun pelaku segera ditangani dengan proses hukum dan korban mendapat pendampingan, publik kembali mempertanyakan integritas sistem pengawasan dan keamanan di institusi tersebut.

Dampak dari kasus-kasus ini sangat signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan pendidikan kedokteran menurun, reputasi institusi terguncang, dan rasa aman bagi peserta didik maupun pasien berkurang. Krisis ini juga menimbulkan kekhawatiran akan kualitas lulusan pendidikan kedokteran yang nantinya akan menjadi tenaga medis di masyarakat.

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

Sebagai respons atas krisis yang terjadi, FK Unpad dan RSHS melakukan sejumlah langkah perbaikan. Pertama, dibentuk Komisi Disiplin, Etika, dan Anti-Kekerasan yang bertugas menerima laporan, melakukan investigasi, dan merekomendasikan sanksi. Kedua, diterbitkan Buku Pedoman Sanksi Kekerasan dan Bullying yang memuat definisi, jenis pelanggaran, serta bentuk sanksi yang diberlakukan secara transparan. Ketiga, seluruh peserta didik diwajibkan menandatangani Pakta Integritas Anti-Bullying sebagai komitmen tertulis untuk menjunjung lingkungan belajar yang aman.

Sanksi terhadap pelaku juga ditegakkan dengan tegas. Beberapa mahasiswa senior PPDS diberhentikan secara permanen, dosen yang terlibat diskors, dan pelaku dengan pelanggaran ringan hingga sedang dikenai perpanjangan masa studi. Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan institusi dalam menegakkan aturan.

Di sisi kebijakan, RSHS berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatur ulang sistem kerja residen. Jam kerja yang terlalu panjang dikurangi, sistem pengawasan diperkuat, dan wacana pemberian insentif bagi peserta didik mulai dibahas untuk mengurangi tekanan psikologis dan fisik yang selama ini dialami.

Untuk kasus pelecehan seksual, pihak kampus dan rumah sakit memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban, serta memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas. Transparansi informasi juga diupayakan, meskipun tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.

Strategi Pencegahan yang Dapat Dilakukan RSHS

Agar kasus serupa tidak terulang, RSHS memerlukan strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. **Sistem Pelaporan dan Proteksi Korban**
Menyediakan saluran pelaporan anonim yang aman, mudah diakses, dan menjamin perlindungan bagi pelapor dari tindakan balas dendam. Laporan harus ditangani oleh tim independen yang memiliki kewenangan investigasi penuh.
2. **Pelatihan Etika dan Anti-Bullying secara Reguler**
Mengadakan workshop wajib setiap tahun untuk seluruh staf, dosen, dan residen mengenai etika profesi, komunikasi efektif, manajemen konflik, serta pencegahan kekerasan.
3. **Monitoring Jam Kerja dan Kelelahan**
Menggunakan sistem absensi digital untuk memantau jam kerja residen. Pengaturan beban kerja perlu disesuaikan dengan standar kesehatan kerja untuk mencegah kelelahan ekstrem yang sering memicu perilaku agresif.
4. **Pemberian Insentif yang Layak**
Memastikan residen mendapatkan kompensasi finansial yang wajar sehingga beban ekonomi tidak menambah tekanan psikologis.
5. **Independensi Komisi Etik**
Membentuk komisi etik yang tidak berada di bawah struktur manajemen rumah sakit, melainkan langsung bertanggung jawab kepada pihak eksternal seperti Kemenkes atau dewan etik nasional.
6. **Penegakan Sanksi yang Konsisten**
Setiap pelanggaran harus ditindak tanpa pandang bulu, dengan dokumentasi publik mengenai hasil investigasi untuk menjaga transparansi.
7. **Edukasi dan Transparansi Publik**
Merilis laporan tahunan tentang jumlah kasus, bentuk penanganan, dan evaluasi pencegahan agar publik mengetahui progres perbaikan institusi.
8. **Kolaborasi dengan Profesi dan Regulator**
Bekerja sama dengan IDI, asosiasi profesi, dan universitas untuk memastikan kebijakan anti-kekerasan sejalan dengan standar nasional.

Kesimpulan

Kasus perundungan dan pelecehan di lingkungan FK Unpad–RSHS telah memicu krisis kepercayaan publik yang signifikan. Meskipun langkah-langkah perbaikan telah

dilakukan, pemulihan kepercayaan memerlukan waktu, konsistensi, dan transparansi. RSHS perlu memastikan bahwa strategi pencegahan dijalankan secara sistematis dan diintegrasikan ke dalam budaya kerja. Dengan komitmen yang kuat, institusi dapat mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas.

LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS LOMBA PERSI

Judul : **Pelayanan Kesehatan dalam masa Krisis: Studi Kasus akibat perundungan dan Dampak Kepercayaan Publik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung**

Penulis Utama : dr. Dodi Lintong Hartoni Lumban Gaol, Sp.B, Subsp.Onk(K)

Bandung, 12 Agustus 2025

Mengetahui,
Direktur Utama
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung,



dr. H. Rachim Dinata Marsidi, Sp.B., FINAC., M.Kes

Penulis

dr. Dodi Lintong Hartoni Lumban
Gaol, Sp.B, Subsp.Onk(K)